

PENDAMPINGAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

Muhammad Mas'ud Said^{1*}, Muhammad Djunaidi Ghony², Nur Fajar Arief³,
Rulam Ahmadi⁴, Akhmad Tabrani⁵, Slamet Muchsin⁶, Pardiman⁷,
Mohammad Afifulloh⁸, Sumartono⁹, Mohammad Muhibbin¹⁰, Sunardi¹¹,
Mutmainnah Mustofa¹², Dwi Ari Kurniawati¹³, Surya Sari Faradiba^{14*}

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Indonesia

masud.said@unisma.ac.id¹, m.djunaidi.ghony@unisma.ac.id², nfarief@unisma.ac.id³,
rulam@unisma.ac.id⁴, tabrani@unisma.ac.id⁵, s_muchsin63@unisma.ac.id⁶, pardiman@unisma.ac.id⁷,
mohammad.afifulloh@unisma.ac.id⁸, sumartono@unisma.ac.id⁹, mohammad.muhibbin@unisma.ac.id¹⁰,
sunardi@unisma.ac.id¹¹, inamustofa@unisma.ac.id¹², dwi.ari@unisma.ac.id¹³,
suryasarifaradiba@unisma.ac.id¹⁴

ABSTRAK

Abstrak: Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan Pendidikan tinggi yang berkualitas menjadi tantangan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) untuk berlomba-lomba menarik minat masyarakat agar memilih institusinya. Ditengah persaingan yang cukup berat, peningkatan mutu menjadi hal yang mutlak bagi PTS agar tetap eksis. PTS dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan akomodasi bagi internasionalisasi PTS, meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kualitas manajemen internal, serta untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memenangkan persaingan tersebut. Pendampingan yang telah dilakukan oleh Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, untuk mewujudkan *Good University Governance* dilakukan di empat universitas, antara lain: Universitas Islam Kadiri, Universitas Kadiri, Universitas Wahidiyah Kediri, dan STKIP Modern Ngawi selama bulan Februari 2023. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keempat perguruan tinggi telah menerapkan prinsip *Good University Governance* yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, dan kewajaran.

Kata Kunci: akuntabilitas; *good university governance*; kemandirian; kewajaran; tanggung jawab; transparansi.

Abstract: *The increasing public demand for quality higher education is a challenge for private tertiary institutions (PTS) to compete in attracting the public's interest in choosing their institution. In the midst of quite tough competition, quality improvement is absolutely essential for PTS to continue to exist. PTS is required to be able to provide the best possible service to the community and be oriented to the needs of the community. This assistance aims to provide accommodation for the internationalization of PTS, increase competitiveness, improve the quality of the learning process and the quality of internal management, as well as to improve performance in order to win the competition. Assistance that has been carried out by the Postgraduate Program, Islamic University of Malang, to realize Good University Governance was carried out at four universities, including: Kadiri Islamic University, Kadiri University, Wahidiyah Kediri University, and STKIP Modern Ngawi during February 2023. The results of the assistance show that the four universities have implemented the principles of Good University Governance which include: transparency, accountability, independence, responsibility, and fairness.*

Keywords: *accountability; good university governance; independence; fairness; responsibility; transparency.*



Article History:

Received: 11-03-2023

Revised : 04-05-2023

Accepted: 05-05-2023

Online : 01-06-2023



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam mewujudkan Good University Governance (GUG). Beberapa masalah yang umum dialami oleh PTS dalam menerapkan GUG antara lain:

1. Kurangnya pengawasan: Salah satu tantangan yang dihadapi PTS dalam menerapkan GUG adalah kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini dapat menyebabkan beberapa PTS melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
2. Kurangnya transparansi: Beberapa PTS belum menerapkan prinsip transparansi secara baik dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, sehingga menyulitkan pengawasan dan mempersulit pertanggungjawaban atas penggunaan dana.
3. Kurangnya keterlibatan stakeholders: Penerapan GUG juga memerlukan partisipasi dan keterlibatan stakeholders dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Namun, kurangnya keterlibatan stakeholders dalam pengelolaan perguruan tinggi dapat mengurangi efektivitas dan akuntabilitas.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten: GUG memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas untuk menerapkannya. Namun, beberapa PTS mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten.
5. Kurangnya perencanaan dan evaluasi yang baik: Penerapan GUG juga memerlukan perencanaan dan evaluasi yang baik untuk memastikan pengelolaan perguruan tinggi berjalan dengan efektif dan efisien. Namun, beberapa PTS belum menerapkan perencanaan dan evaluasi dengan baik.
6. Rendahnya kualitas dan daya saing: Beberapa PTS masih menghadapi masalah kualitas dan daya saing yang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga membuat sulit untuk menerapkan GUG secara konsisten.

Lebih lanjut, Tujuan GUG adalah untuk memberikan akomodasi bagi internasionalisasi Perguruan Tinggi, meningkatkan daya saing, kualitas proses pembelajaran, kualitas manajemen internal, dan untuk mencapai kinerja. Dengan adanya GUG diharapkan kinerja Perguruan Tinggi akan lebih baik atau meningkat (Evaliandia & Sulistyowati, 2020). Disamping itu, tata kelola lembaga yang baik adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan lembaga yang menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (Indarti et al., 2022). Dalam hal ini, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam tata kelola lembaga yang baik, yaitu (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan tentang lembaga (Risanty & Kesuma, 2019); (2) akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban setiap unsur dalam lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat dilaksanakan secara efektif (Ginting et al., 2020); (3) tanggung jawab, yaitu kepatuhan pengelolaan lembaga terhadap prinsip, hukum dan peraturan lembaga (Nurlatifa et al., 2021); (4) kemandirian, yaitu situasi dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan (Noviardy & Aliya, 2020); dan (5) *fairness*, yaitu perlakuan yang adil dan merata dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang tertuang dalam perjanjian dan peraturan (Larasati et al., 2018). Dalam kaitannya dengan tata kelola di perguruan tinggi, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Tujuan jangka panjang yang diharapkan dari tata pemerintahan yang baik implementasi di perguruan tinggi swasta tidak hanya meningkatkan perannya sebagai pengajaran universitas, tetapi juga memungkinkan untuk berkembang menjadi universitas yang berbasis riset dan selanjutnya, universitas yang berbasis wirausaha.

Salah satu indikator terakreditasi “Unggul” universitas adalah penerapan tata kelola universitas yang baik. Jika universitas telah menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, maka kemungkinan besar akan tercapai akreditasi “Unggul”. Tridarma perguruan tinggi mempunyai tiga poin yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Ketiganya menjadi poin penting dalam mewujudkan visi dari perguruan tinggi. Ketiga hal tersebut juga menjadi tanggung jawab semua elemen yang terdapat di Perguruan Tinggi, diantaranya mahasiswa, dosen, serta berbagai sivitas akademika yang terlibat. Dalam hal ini, Universitas Islam Malang sebagai salah satu Universitas Swasta yang telah terakreditasi “Unggul” melakukan berbagai terobosan untuk bekerja sama dengan universitas lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Islam Kadiri, Universitas Kadiri, Universitas Wahidiyah Kediri, dan STKIP Modern Ngawi.

Pada prinsipnya, ada lima prinsip GUG, yaitu (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) tanggung jawab; (4) kemandirian; dan (5) keadilan. Prinsip-prinsip ini diperlukan untuk lembaga pendidikan tinggi untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan sambil tetap menjaga pemangku kepentingan mereka. Lebih lanjut, tata kelola perguruan tinggi telah menjadi pilar bagi perguruan tinggi dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misinya, dengan tujuan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, profesionalisme, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini mirip dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah organisasi (Suriyani & Ismail, 2021).

Selanjutnya, untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, pengelola harus menerapkan konsep GUG. Dengan demikian maka

perguruan tinggi akan terjamin tumbuh dan berkelanjutan. Di sisi lain, manajemen pendidikan merupakan pelayanan publik, sehingga dibutuhkan akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik untuk membentuk lembaga pendidikan.

B. METODE PELAKSANAAN

Pendampingan yang telah dilakukan oleh Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, untuk mewujudkan GUG dilakukan di empat universitas, antara lain: Universitas Islam Kediri, Universitas Kadiri, Universitas Wahidiyah Kediri, dan STKIP Modern Ngawi selama bulan Februari 2023.

Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pendampingan dengan melibatkan 24 orang yang terdiri dari unsur pimpinan, ketua program studi, dan staf program pascasarjana Universitas Islam Malang. Berikut adalah beberapa langkah pendampingan yang telah dilaksanakan:

1. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik - Mentor dan perguruan tinggi harus bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik dalam hal *good university governance*, seperti mengembangkan kebijakan dan prosedur yang transparan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas institusi.
2. Menentukan sumber daya yang tersedia - Mentor dan perguruan tinggi harus mengevaluasi sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, anggaran, dan tenaga kerja, untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Menyusun rencana aksi - Mentor dan perguruan tinggi harus bekerja sama untuk menyusun rencana aksi yang jelas dan terperinci untuk mencapai tujuan *good university governance*, termasuk tahapan konkret dan tenggat waktu.
4. Melakukan pelatihan dan bimbingan - Mentor dapat memberikan pelatihan dan bimbingan kepada staf perguruan tinggi tentang praktik tata kelola yang baik, seperti etika dan integritas, manajemen keuangan, dan pemenuhan hukum dan regulasi.
5. Menyusun indikator keberhasilan - Mentor dan perguruan tinggi harus menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, seperti peningkatan partisipasi masyarakat, penurunan tingkat korupsi, atau peningkatan transparansi, untuk memantau kemajuan dan memperbaiki kinerja mereka.
6. Mengevaluasi dan meninjau kembali - Setelah mencapai tujuan yang ditetapkan, mentor dan perguruan tinggi harus mengevaluasi dan meninjau kembali proses dan hasilnya, untuk memastikan bahwa mereka telah mencapai hasil yang diinginkan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan di masa depan.

Dengan menggunakan metode pendampingan, perguruan tinggi dapat memperkuat kapasitas mereka dalam praktik tata kelola yang baik dan membangun sistem tata kelola yang lebih baik secara berkelanjutan. Secara umum, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan *time line*, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Timeline Pelaksanaan Pendampingan

No	Aktivitas	Minggu ke				
		I Feb	II Feb	III Feb	IV Feb	I Maret
1	Rapat internal koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan pendampingan	■				
2	Penyiapan berkas administrasi untuk melaksanakan pendampingan	■	■			
3	Rapat eksternal koordinasi pelaksanaan kegiatan pendampingan		■	■		
4	Penyusunan materi pendampingan			■	■	
5	Pendampingan Perwujudan GUG di Universitas Islam Kadiri, Universitas Kadiri, Universitas Wahidiyah Kediri, STKIP Modern Ngawi.				■	
6	Monitoring dan Evaluasi					■
7	Penyusunan artikel					■
8	Penyusunan laporan akhir					■

Sebagai bahan evaluasi, responden yang terdiri dari 10 orang secara acak dari masing-masing Perguruan Tinggi diminta untuk menjawab lima pertanyaan yang diukur menggunakan Skala Likert 1 - 5. Skala Likert 1 menunjukkan respon terendah untuk masing-masing variable, sementara skala Likert 5 menunjukkan respon yang tertinggi. Adapun indikator transparansi yang digunakan dalam proses ini adalah: (1) tersedianya informasi yang dapat diakses oleh semua pihak, baik internal maupun eksternal; (2) memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan sektor publik serta layanan dan proses publik; (3) menerapkan prinsip transparansi keuangan, misalnya tersedianya laporan keuangan yang tersedia untuk umum di situs resmi universitas; (4) Proses seleksi pejabat struktural atau pengurus Perguruan Tinggi dilakukan secara terbuka; dan (5) Sistem dan tata cara penerimaan mahasiswa baru, pengajar, dan pegawai perguruan tinggi dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh public secara terbuka.

Beikutnya indikator akuntabilitas terdiri dari: (1) menyajikan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan secara terbuka, segera, dan akurat kepada masyarakat; (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat; (3) setiap pejabat struktural, senator fakultas/akademik, pengurus yayasan, staf fakultas dan universitas memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas (secara tertulis); (4) pengukuran kinerja, proses pengukuran kinerja, pemantauan dan pelaporan, dan penjaminan kinerja; dan (5) memastikan bahwa administrasi universitas memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

Indikator responabilitas terdiri dari: (1) mampu membangun iklim akademik yang kondusif; (2) mampu berinovasi untuk pembangunan ekonomi; (3) dapat menjamin kebebasan ilmiah semua kolaborator untuk memberikan kontribusi atau pendapat sesuai dengan kompetensinya; (4) pendidikan profesi atau disiplin ilmu yang dibutuhkan masyarakat sebagai ciri pendidikan tinggi; dan (5) mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Indikator kemandirian terdiri dari: (1) proses pengambilan keputusan dilakukan secara mandiri dan tanpa tekanan dari pihak lain untuk memastikan keputusan dapat diambil untuk kepentingan terbaik perguruan tinggi; (2) tidak mengandung pengaruh luar yang tidak sesuai dengan prinsip pendidikan tinggi; (3) masing-masing pihak menghindari kendali kedua belah pihak dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu; (4) mampu mengambil keputusan secara objektif; dan (5) Mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Indikator kewajaran terdiri dari: (1) memperlakukan pihak yang terkena dampak secara setara dan adil; (2) memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai dan mahasiswa untuk menjalankan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi; (3) menegakkan reward dan punishment bagi semua pihak tanpa diskriminasi; (4) melakukan pengangkatan pegawai dan pejabat berdasarkan kualifikasi dan pengalaman profesional; dan (5) penerapan merit system terkait pengelolaan karyawan yang baik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi

Tata kelola universitas yang baik membuat seluruh sivitas akademika bekerja dalam kontrol (Nulhaqim et al., 2016). Oleh karena itu, semua pihak akan efektif dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini dapat meminimalkan keputusan yang salah atau subjektivitas karena keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini pengambilan keputusan selalu didasarkan pada rekomendasi atau pendapat dari pihak pemilik wewenang

dan tanggung jawab. Hal ini tergantung pada keputusan apa yang diambil. Adapun deskripsi aspek transparansi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Deskripsi Aspek Transparansi

Perguruan Tinggi	Mean	Keterangan
Universitas Islam Kediri	4.8	
Universitas Kediri	4.7	Rata-rata 4.725
Universitas Wahidiyah Kediri	4.6	(Sangat Tinggi)
STKIP Modern Ngawi	4.8	

2. Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan salah satu indikator yang baik untuk menilai pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan (Agus Wahyudin et al., 2017). Terkait dengan akuntabilitas, perguruan tinggi yang mengikuti pendampingan ini sudah memiliki fungsi dan tingkatan yang jelas tanggung jawab, sehingga manajemen universitas efektif dalam arti telah memenuhi indikator universitas yang kredibel. Komposisi ini berarti tanggung jawab itu untuk pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban dalam melakukan segala kegiatan telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan setiap dosen memiliki tanggung jawab untuk mengajar, meneliti dan mengabdikan diri kepada masyarakat (tridarma perguruan tinggi) (Pujiono & Satyawan, 2011). Oleh karena itu, itu kewajiban bagi dosen untuk membuat laporan pertanggungjawaban kinerjanya. Setiap tahun dosen wajib melaporkan hasil kerjanya sesuai dengan tridarma perguruan tinggi, jika tidak, mereka mendapat peringatan. Adapun deskripsi aspek akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Deskripsi Aspek Akuntabilitas

Perguruan Tinggi	Mean	Keterangan
Universitas Islam Kediri	4.2	
Universitas Kediri	4.4	Rata-rata 4.275
Universitas Wahidiyah Kediri	4.1	(Sangat Tinggi)
STKIP Modern Ngawi	4.4	

3. Tanggung jawab (responsibility)

Fokus aspek tanggung jawab adalah kesesuaian manajemen universitas terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Rianti, 2011). Hal ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip universitas yang pengelolaannya sehat. Untuk mendukung hal tersebut, kedudukan, fungsi dan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing unit organisasi dituangkan melalui anggaran dasar, uraian tugas dan standar prosedur (SOP) yang jelas tercantum dalam anggaran dasar. Pemberian beasiswa CSR kepada mahasiswa juga dituangkan dalam Statuta. Kondisi ini mendapat respon 100%, jadi ini artinya semua universitas yang didampingi sudah

menerapkannya. Adapun deskripsi aspek tanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Deskripsi Aspek Tanggung Jawab

Perguruan Tinggi	Mean	Keterangan
Universitas Islam Kadiri	4.5	
Universitas Kadiri	4.5	Rata-rata 4.475
Universitas Wahidiyah Kediri	4.6	(Sangat Tinggi)
STKIP Modern Ngawi	4.3	

4. Kemandirian

Kemandirian adalah pengelolaan perguruan tinggi yang profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menuntut universitas dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau campur tangan dari pihak manapun yang bukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sutini, 2019). Adapun deskripsi aspek kemandirian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Deskripsi Aspek Kemandirian

Perguruan Tinggi	Mean	Keterangan
Universitas Islam Kadiri	4.5	
Universitas Kadiri	4.2	Rata-rata 4.325
Universitas Wahidiyah Kediri	4.5	(Sangat Tinggi)
STKIP Modern Ngawi	4.1	

5. Kewajaran

Dalam tata kelola yang baik pada prinsipnya menuntut perlakuan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, harapannya keadilan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memantau dan memberikan jaminan keadilan perlakuan diantara dan melibatkan berbagai kepentingan perusahaan. Selain itu, ini keadilan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena menyangkut seluruh sivitas akademika yang bekerja dalam system di perguruan tinggi (Widjajanti & Sugiyanto, 2015). Adapun deskripsi aspek kewajaran dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Deskripsi Aspek Kewajaran

Perguruan Tinggi	Mean	Keterangan
Universitas Islam Kadiri	4.3	
Universitas Kadiri	4.3	Rata-rata 4.3
Universitas Wahidiyah Kediri	4.2	(Sangat Tinggi)
STKIP Modern Ngawi	4.4	

Secara lebih spesifik, STKIP Modern Ngawi memiliki skor tertinggi pada aspek transparansi. Adapun dokumentasi kegiatan pendampingan di STKIP Modern Ngawi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Pendampingan di STKIP Modern Ngawi

Selanjutnya, Universitas Islam Kadiri juga memiliki skor tertinggi pada aspek transparansi. Adapun dokumentasi kegiatan pendampingan di Universitas Islam Kadiri dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Pendampingan di Universitas Islam Kadiri

Selanjutnya, Universitas Wahidiyah Kediri memiliki skor tertinggi pada dua aspek, yakni Transparansi dan Tanggung Jawab. Adapun dokumentasi kegiatan pendampingan di Universitas Wahidiyah Kediri dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Pendampingan di Universitas Wahidiyah Kediri

Terakhir, Universitas Kadiri memiliki skor tertinggi pada aspek transparansi. Adapun dokumentasi kegiatan pendampingan di Universitas Wahidiyah Kediri dapat dilihat pada Gambar 4. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good University Governance* dapat mendukung kinerja perguruan tinggi (Rahmadianitami et al., 2019), seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Pendampingan di Universitas Kadiri

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sebuah universitas atau perguruan tinggi yang memiliki *good governance* pada dasarnya merupakan pengelolaan struktur organisasi, proses bisnis, program dan kegiatan dalam suatu rencana yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan, visi dan misi universitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perguruan Tinggi perlu menyediakan beberapa prinsip penting yaitu transparansi, akuntabilitas (kepada pemangku kepentingan), tanggung jawab, independensi dalam pengambilan keputusan, serta keadilan,

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang dan yang telah memberikan support dalam kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Selain itu, tak lupa juga penulis menghaturkan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada segenap Pimpinan, Dosen dan Staf dari Universitas Islam Kadiri, Universitas Wahidiyah Kediri, Universitas Kadiri, dan STKIP Modern Ngawi yang telah berkenan menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Agus Wahyudin, -, Ahmad Nurkhin, F. P. E., & Kiswanto, -. (2017). *Hubungan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi*.

- Evaliandia, N., & Sulistyowati, E. (2020). Pengaruh Implementasi Prinsip – Prinsip Good University Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(10). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3665>
- Ginting, R., Harun, C. Z., & Usman, N. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Good University Governance (Gug) Pada Stkip Bina Bangsa Getsempena. *Visipena*, 11(2), 243–254. <https://doi.org/10.46244/VISIPENA.V11I2.1286>
- Indarti, I., Apriliyani, I. B., & Aljufri, A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Good University Governance, Dan Penggunaan Teknologi Informasi, Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 312–321. <https://doi.org/10.35446/AKUNTANSIKOMPETIF.V5I3.1030>
- Larasati, R., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2018). Analisis Penerapan Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Di Kota Jayapura. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 304–323. <https://doi.org/10.30871/JAMA.V2I2.951>
- Noviardy, A., & Aliya, S. (2020). Pengaruh Employee Engagement dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit. *MBIA*, 19(3), 258–272. <https://doi.org/10.33557/MBIA.V19I3.1143>
- Nulhaqim, S. A., Heryadi, D. H., Pancasilawan, R., & Ferdryansyah, M. (2016). Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 197. <https://doi.org/10.24198/SHARE.V6I2.13209>
- Nurlatifa, A., Suratman, B., & Hariyati, D. (2021). Good University Governance Management Pattern Public Service Agency. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 28–34. <https://doi.org/10.21070/JAS.V5I1.429>
- Pujiono, P., & Satyawan, M. D. (2011). Menciptakan Mutu Perguruan Tinggi (Higher Educations) Berskala Internasional Melalui Strategi Penerapan Tata Kelola Universitas Yang Baik (Good University Governance). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.26740/JAJ.V3N1.P59-69>
- Rahmadianitami, A., Fitriah, E., & Nurleli, N. (2019). Analisis Penerapan Good University Governance dalam Meningkatkan Kinerja Perguruan Tinggi. *Prosiding Akuntansi*, 0(0), 188–196. <https://doi.org/10.29313/.V0I0.16781>
- Rianti, *. (2011). Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(13). <https://doi.org/10.30996/DIH.V7I13.252>
- Risanty, R., & Kesuma, S. A. (2019). Good university governance: experience from Indonesian university. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(4), 515–524. <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i4.6195>
- Suriyani, S., & Ismail, Z. (2021). Pengaruh Satuan Pengawasan Internal (SPI) Dan Penerapan Internal Control Terhadap Pencapaian Good University Governance (GUG) Pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 4(1), 34–42. <https://doi.org/10.33557/JIBM.V4I1.1279>
- Sutini, L. (2019). Akibat Hukum PTN BH yang Tidak Memenuhi Evaluasi Kinerja. *Jurist-Diction*, 2(5), 1765. <https://doi.org/10.20473/JD.V2I5.15242>
- Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2015). Good University Governance Untuk Meningkatkan Excellent Service Dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 69. <https://doi.org/10.26623/JDSB.V17I1.504>